

# UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA MALANG

(Sami Ely Mokiri), (Ali Hanafiah)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Program Studi Administrasi Publik

(Sami Ely Mokiri)

Email : [ellysemy8@gmail.com](mailto:ellysemy8@gmail.com)

## ***ABSTRACT***

*This study examines the efforts of the Malang City Transportation Agency in controlling illegal parking and identifies the supporting and inhibiting factors. The rapid growth of vehicles is not matched by adequate official parking facilities, resulting in widespread illegal parking that causes traffic congestion, illegal fees, and discomfort for road users. The research employed a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation. The findings show that the agency has implemented several measures such as installing signs, conducting patrols, joint operations, and guiding parking attendants. Supporting factors include existing regulations and partial community support, while inhibiting factors involve limited personnel, resistance from illegal parking attendants, and the lack of official parking lots. The study concludes that the enforcement efforts have been carried out according to regulations but remain less effective. Therefore, a more comprehensive strategy is needed, including the provision of parking facilities and a persuasive approach to the community. This research is expected to contribute to public administration studies and provide practical recommendations for local governments in managing urban transportation problems more effective.*

**Keywords:** *illegal parking, public administration, transportation agency.*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menertibkan parkir liar serta faktor pendukung dan penghambatnya. Pertumbuhan kendaraan yang pesat tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir resmi, sehingga praktik parkir liar semakin marak dan menimbulkan kemacetan, pungutan liar, serta ketidaknyamanan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dishub telah melakukan langkah-langkah seperti pemasangan rambu, patroli, operasi gabungan, serta pembinaan juru parkir. Faktor pendukung penertiban adalah adanya regulasi dan dukungan sebagian masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan personel, resistensi juru parkir liar, dan minimnya lahan parkir resmi. Penelitian menyimpulkan bahwa penertiban sudah berjalan sesuai aturan, tetapi belum maksimal, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif termasuk penyediaan fasilitas parkir dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengelola permasalahan transportasi perkotaan secara lebih efektif.

**Kata kunci:** parkir liar, administrasi publik, Dinas Perhubungan.

### 1. PENDAHULUAN

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur mengalami perkembangan pesat dalam bidang transportasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir resmi yang memadai, sehingga banyak masyarakat memilih parkir di lokasi-lokasi yang tidak semestinya. Fenomena ini memunculkan masalah parkir liar di berbagai titik strategis, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan tata kota, serta ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan.

Dinas Perhubungan Kota Malang telah berupaya melakukan berbagai tindakan penertiban, mulai dari

pemasangan rambu larangan parkir, patroli rutin, operasi gabungan dengan aparat penegak hukum, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Namun, parkir liar tetap terjadi karena adanya faktor sosial-ekonomi, resistensi dari juru parkir, serta keterbatasan sarana parkir resmi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penertiban parkir liar bukan sekadar persoalan teknis lalu lintas, melainkan juga terkait aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Perhubungan dalam menangani parkir liar di Kota Malang.

Parkir liar juga mencerminkan lemahnya budaya disiplin masyarakat

dalam menaati aturan lalu lintas. Keberadaan parkir liar yang dianggap praktis oleh sebagian orang menimbulkan pembiaran sosial yang jika tidak segera ditangani akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga persuasif, edukatif, dan menyentuh akar masalah sosial-ekonomi.

Di sisi lain, keberhasilan penertiban parkir liar akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di bidang transportasi. Jika masyarakat merasa terlayani dengan baik melalui ketersediaan fasilitas parkir resmi yang memadai, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat. Sebaliknya, kegagalan dalam menata parkir justru akan memperkuat citra negatif terhadap kinerja pemerintah.

## **2. TINJAUAN PUSTKA**

### **Administrasi Publik dan Pelayanan**

Administrasi publik berperan dalam penyelenggaraan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Prinsip utama administrasi publik adalah akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan. Dalam konteks transportasi, administrasi publik tercermin pada peran pemerintah daerah dalam mengatur, mengawasi, dan menyediakan fasilitas yang menunjang kelancaran lalu lintas.

Lebih jauh, administrasi publik juga menekankan pada pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Artinya, pemerintah tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks parkir, hal ini berarti penyediaan lahan parkir yang memadai, pengelolaan yang transparan, serta pengawasan yang berkelanjutan.

### **Parkir dan Parkir Liar**

Parkir merupakan kegiatan menempatkan kendaraan dalam waktu tertentu di lokasi yang ditentukan. Parkir liar adalah parkir yang dilakukan di area terlarang atau tanpa izin resmi, sehingga seringkali menimbulkan kemacetan, pungutan liar, serta mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Praktik parkir liar biasanya muncul akibat keterbatasan lahan parkir resmi dan tingginya kebutuhan masyarakat akan akses cepat ke lokasi aktivitas.

Fenomena parkir liar bukan hanya permasalahan lalu lintas, melainkan juga persoalan sosial dan ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, parkir liar menjadi sumber penghasilan utama, sehingga mereka cenderung menolak penertiban. Sementara itu, bagi pengguna jalan, parkir liar dianggap solusi praktis karena lokasinya dekat dengan tujuan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar memiliki dimensi multidimensi yang membutuhkan penanganan komprehensif.

### **Kerangka Berpikir**

Dari sudut pandang teori administrasi publik, penertiban parkir liar dapat dipahami sebagai implementasi kebijakan pemerintah daerah. Efektivitasnya dipengaruhi oleh regulasi, sumber daya aparatur, fasilitas pendukung, serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penertiban parkir liar di Kota Malang sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, juru parkir, dan masyarakat pengguna jalan.

Kerangka berpikir ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah parkir liar tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal. Diperlukan kombinasi strategi yang meliputi aspek regulasi, pengawasan, penyediaan fasilitas, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penertiban parkir liar dapat berjalan efektif sekaligus memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan transportasi perkotaan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang dalam penertiban parkir liar. Pendekatan ini dipilih karena

mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial di lapangan dan menggali informasi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat melihat langsung proses penertiban yang dilakukan serta respon dari berbagai pihak terkait. Lokasi penelitian berada di titik-titik rawan parkir liar di kawasan strategis Kota Malang.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dishub, juru parkir liar, serta masyarakat pengguna jalan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dishub, peraturan daerah, laporan kegiatan, serta dokumentasi berupa foto dan arsip Dishub yang mendukung hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi berupa foto dan arsip Dishub. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun tetap fleksibel mengikuti alur informasi dari narasumber. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas parkir liar serta langkah-langkah penertiban yang dilakukan Dishub di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai bahan pelengkap untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara naratif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang terkumpul menunjukkan pola tertentu yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik ini, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi divalidasi melalui berbagai sudut pandang sehingga keabsahannya lebih terjamin. Triangulasi juga membantu menghindari bias data dan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan.

Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian dengan cara meminta persetujuan dari informan sebelum dilakukan wawancara, menjaga kerahasiaan identitas narasumber jika diminta, serta menyajikan data secara objektif tanpa manipulasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan

tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

#### **4. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang telah melakukan berbagai langkah dalam menertibkan parkir liar. Upaya tersebut antara lain pemasangan rambu larangan parkir di jalan-jalan utama, pelaksanaan patroli rutin, operasi gabungan dengan pihak kepolisian dan Satpol PP, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dishub juga melakukan pembinaan terhadap juru parkir liar agar bersedia bergabung sebagai juru parkir resmi dengan izin dari pemerintah. Langkah ini menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga persuasif dalam mengatasi masalah parkir liar.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa praktik parkir liar belum sepenuhnya hilang. Pada beberapa titik tertentu, juru parkir liar tetap beroperasi karena tingginya permintaan tempat parkir dari masyarakat. Hal ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas parkir resmi yang disediakan pemerintah, sehingga masyarakat seringkali memilih menggunakan parkir liar yang lebih dekat dengan lokasi aktivitas mereka. Kondisi ini membuat efektivitas penertiban parkir liar

belum maksimal meskipun tindakan pengawasan dan penindakan terus dilakukan.

Penelitian juga menemukan bahwa resistensi dari juru parkir liar menjadi salah satu kendala serius. Sebagian juru parkir menolak upaya penertiban karena alasan ekonomi, mengingat pekerjaan tersebut merupakan sumber penghasilan utama mereka. Bahkan pada beberapa kasus, juru parkir liar mencoba menghindari razia dengan berpindah lokasi atau beroperasi pada jam-jam tertentu ketika pengawasan Dishub berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, dukungan masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penertiban. Sebagian masyarakat menyatakan setuju dengan upaya Dishub karena merasa terbantu dalam menciptakan kelancaran lalu lintas. Namun, ada pula masyarakat yang masih bersikap permisif terhadap keberadaan parkir liar karena menganggapnya lebih praktis dan dekat dengan lokasi tujuan. Perbedaan persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub dalam menciptakan budaya tertib parkir di Kota Malang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa program e-parkir berbasis digital yang direncanakan Dishub masih dalam

tahap uji coba dan belum diterapkan secara menyeluruh. Padahal, sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan parkir dan meminimalisir praktik pungutan liar. Kendala utama dalam penerapan e-parkir adalah kurangnya fasilitas pendukung dan literasi digital masyarakat yang masih rendah, sehingga perlu ada sosialisasi yang lebih intensif sebelum program tersebut bisa berjalan efektif.

## **Pembahasan**

### **Upaya penertiban parkir liar**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penertiban parkir liar yang dilakukan Dishub Kota Malang sudah sesuai dengan dasar hukum dan kebijakan yang berlaku. Namun efektivitasnya belum maksimal karena masih terkendala oleh faktor sosial, ekonomi, dan keterbatasan sarana.

Jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983), faktor penghambat yang ditemukan di lapangan selaras dengan pandangan bahwa keterbatasan sumber daya dan resistensi target kebijakan menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini terbukti dengan masih adanya juru parkir liar yang menolak penertiban serta masyarakat yang tetap menggunakan parkir liar karena keterbatasan lahan parkir resmi.

Sesuai dengan konsep resources-based view (Robbins, 2010), dukungan

masyarakat merupakan modal strategis dalam keberhasilan kebijakan. Dukungan masyarakat Kota Malang yang menginginkan ketertiban lalu lintas menjadi potensi besar yang perlu terus ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai.

Pembahasan ini menegaskan bahwa penertiban parkir liar tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan tindakan represif. Diperlukan kombinasi strategi berupa penambahan fasilitas parkir resmi, penguatan jumlah personel lapangan, inovasi melalui sistem e-parkir, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat dan juru parkir liar agar tercapai perubahan perilaku secara berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang dalam menertibkan parkir liar dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain pemasangan rambu larangan parkir, pelaksanaan patroli rutin, operasi gabungan dengan kepolisian dan Satpol PP, sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan juru parkir liar, serta perencanaan penerapan sistem e-parkir digital.

Faktor pendukung penertiban antara lain adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,

koordinasi dengan instansi terkait, serta dukungan sebagian masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan jumlah personel Dishub, resistensi juru parkir liar yang menggantungkan hidupnya pada praktik ilegal tersebut, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan, serta minimnya fasilitas parkir resmi di kawasan strategis.

Secara keseluruhan, upaya Dishub sudah menunjukkan komitmen dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, namun keberhasilan penuh membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, Dishub Kota Malang perlu menambah jumlah personel di lapangan agar pengawasan dapat lebih efektif, terutama pada titik rawan parkir liar dan pada jam sibuk. Kedua, pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas parkir resmi yang lebih luas dan mudah diakses masyarakat sehingga mereka memiliki alternatif selain parkir liar. Ketiga, penerapan program e-parkir harus segera dioptimalkan dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai serta memberikan sosialisasi intensif

kepada masyarakat agar sistem ini dapat berjalan dengan baik.

Pembinaan dan pendekatan persuasif kepada juru parkir liar harus terus dilakukan sehingga mereka dapat beralih menjadi juru parkir resmi dan tidak kembali melakukan praktik ilegal. Kolaborasi antarinstansi, baik Dishub, Polri, Satpol PP, maupun masyarakat, juga harus diperkuat agar tercipta sinergi yang berkesinambungan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya penertiban parkir liar tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum di Kota Malang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). California: SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Ontario: Oxford University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Robbins, S. P., & Coulter, M.

- (2010). *Management* (11th ed.).  
New Jersey: Pearson Education.
- Soetomo. (2012). *Strategi-Strategi  
Pembangunan Masyarakat*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian  
Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.  
Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan:  
Dari Formulasi ke Implementasi  
Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi  
Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik:  
Teori, Proses, dan Studi Kasus*.  
Yogyakarta: CAPS.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3  
Tahun 2015 tentang  
Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20  
Tahun 2016 tentang  
Penyelenggaraan Parkir.